



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2015/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Balai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayando Yamtel, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

ANDI SAMSUDIN BUGIS bin **ANDI JAMALUDIN**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

NYAI MASWATU binti **ABIDIN MASWATU**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 103/Pdt.P/2015/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ABIDIN MASWATU, dengan saksi nikah masing-masing bernama Hi. NANAT dan MAIL TUSYEK, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuaian serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. ANDI RISMAWATI BUGIS binti ANDI SAMSUDIN BUGIS, umur 12 tahun;
 - 5.2. ANDI RISWAN BUGIS bin ANDI SAMSUDIN BUGIS, umur 11 tahun;
 - 5.3. ANDI ARIFIN I. BUGIS bin ANDI SAMSUDIN BUGIS, umur 7 tahun;
 - 5.4. ANDI ALI AKBAR BUGIS bin ANDI SAMSUDIN BUGIS, umur 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai Dasar Penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ANDI SAMSUDIN BUGIS bin ANDI JAMALUDIN BUGIS) dengan Pemohon II (NYAI MASWATU binti ABIDIN MASWATU) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2002 di hadapan imam masjid desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Mambebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majalis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan satu orang saksi yang bernama:

1. **Kadir Rahawarin bin Muh. Saleh Rahawarin**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena saudara sepupu;
 - ♦ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
 - ♦ Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ♦ Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abidin Maswatu;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- ♦ Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi Nanat dan Mail Tusyek;
- ♦ Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- ♦ Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- ♦ Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- ♦ Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan tidak keberatan serta menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dibuktikan secara lengkap/semurna, olehnya itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) guna melengkapi bukti-buktinya sehingga dapat memenuhi standar minimal pembuktian menurut hukum, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 103/Pdt.P/2015/PA TI yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar penetapan sela di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145 angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah yang pada intinya pada tanggal 8 April 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Imam Masjid Al Muhajirin Desa Tayando Yamtel, dan yang bertidak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin Maswatu dengan Saksi Nikah masing-masing bernama Hi. Nanat dan Mail Tusyek, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : ayat (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*; dan ayat (3) *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan isbat yang diajukan para Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak tercatat dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan isbat para Pemohon tersebut berkenaan dengan poin "e", sehingga dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pada Pemohon di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya telah menghadirkan satu orang Saksi dan sumpah Supletoir;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan saksi I tidak dapat dijadikan bukti untuk mengetahui proses pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan apakah sah secara hukum Islam atau tidak?, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi dan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi, Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta harus disimpulkan ketidak benaran dalil permohonan para Pemohon, mengingat perkawinan sesuatu yang sakral sehingga harus benar-benar diketahui tentang kejadian pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menentukan keterangan satu saksi tidak dapat dipercaya dan hanya diklasifikasi sebagai bukti permulaan, oleh karena itu untuk menguatkan keterangan saksi I tersebut maka para Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berguna untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar penetapan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2015, dan keterangan saksi I yang sebelumnya diklasifikasi sebagai bukti permulaan, sehingga berdasarkan keterangan saksi 1 serta sumpah pelengkap di atas maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Abidin Maswatu dengan saksi nikah masing-masing bernama Hi Nanat dan Mail Tusyek, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 8 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa di dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Andi Samsudin Bugis bin Andi Jamaluddin**) dengan Pemohon II (**Nyai Maswatu binti Abidin Maswatu**) yang dilaksanakan, pada tanggal 8 April 2002, di Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H, oleh kami **Syarifa Saimima, SHI** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Rugaya**

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA Tl. halaman 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharusun, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wawan Jamal, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti

Rugaya Raharusun, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Materai	Rp.	6.000,00,-

J u m l a h Rp. 191.000,00,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2015/PA TI. halaman 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)